

B

**PENATAAN PELAYANAN IMB (IJIN MENDIRIKAN
BANGUNAN) DI KOTA SURABAYA SEBAGAI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SK WALIKOTA SURABAYA
NO. 68 TAHUN 1998**

KK

Fis AN 19 / 03

uto

P

SKRIPSI



Oleh

**WIRYAWAN ADI UTOMO
NIM 079815693**

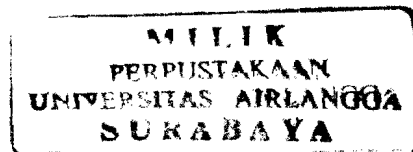


**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Semester Gasal 2002/2003**

**PENATAAN PELAYANAN IMB (IJIN MENDIRIKAN
BANGUNAN) DI KOTA SURABAYA SEBAGAI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SK WALIKOTA SURABAYA
NO. 68 TAHUN 1998**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada
Program Studi Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga**



(Oleh

**WIRYAWAN ADI UTOMO
NIM 079815695**

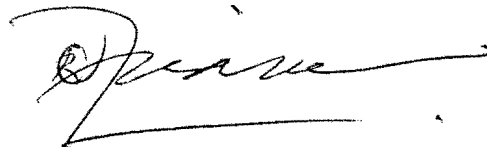
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Semester Gasal 2002/2003**

Halaman Persetujuan

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, Desember 2002

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Wahyuni Triana', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dra. Wahyuni Triana, Msi
NIP : 131 570 345

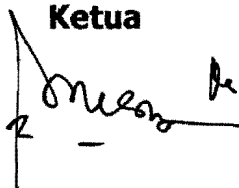
HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga pada :**

**Hari : Rabu
Tanggal : 15 Januari 2002
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang 250**

DEWAN PENGUJI terdiri dari :

Ketua



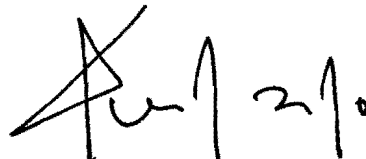
**Drs. Roestoto Hartojo Putro, SU
NIP.130 783 545**

Anggota



**Dra. R Wahyuni Triana, MSi
NIP.131 570 345**

Anggota



**Drs. Bintoro Wardiyanto, MSi
NIP.131 801 405**

ABSTRAKSI

Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana implementasi kebijakan SK Walikota Surabaya No. 68 Tahun 1998 tentang tata cara pelayanan umum satu atap di Pemerintah Kota Surabaya beserta faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, dan apakah kebijakan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mengurus IMB lebih tinggi. Dan pada penelitian ini peneliti lebih menspesifikan permasalahan pada pelayanan pengurusan IMB mengingat banyaknya perijinan yang diatur dalam kebijakan tersebut. Hal ini didasarkan pada fenomena empiris bahwa implementasi kebijakan SK Walikota Surabaya No.68 tahun 1998 belum optimal, tidak komprehensif dan banyak menemui hambatan. Karena itu, penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara empiris dari implementasi kebijakan beserta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe eksplanatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda wawancara, observasi serta penggunaan dokumen sebagai sumber data sekunder. Wawancara secara langsung dilakukan terhadap informan dengan teknik pengambilan sample purposive, yakni atas dasar apa yang diketahui tentang variasi serta elemen yang ada dan terkait dengan implementasi kebijakan SK Walikota Surabaya No.68 Tahun 1998.

Observasi dilakukan terhadap sikap pelaksana dalam melaksanakan tugasnya, serta pada kondisi obyek sasaran. Penggunaan dokumen dilakukan untuk memperoleh data-data tentang pencapaian tujuan penelitian. Untuk memeriksa keabsahan data digunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan, dokumen yang ada. Analisa berupa kata-kata dan berkisar pada data kualitatif. Dengan menggunakan teori seperti yang diungkapkan oleh George Edwards bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, peneliti mencoba untuk menganalisa dari kebijakan SK Walikota Surabaya No.68 Tahun 1998 yaitu mengenai implementasi beserta faktor-faktor yang didasarkan pada teori tersebut. Namun pada penelitian ini peneliti menambah satu faktor dari implelementasi kebijakan sebagai pendukung dalam menganalisa yaitu dukungan kelompok sasaran yang mengadopsi dari pendapat Grindle tentang kepentingan yang dipengaruhi dan jenis manfaat yang diperoleh, menunjukkan masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan penataan pelayanan perijinan. Hambatan yang utama adalah sikap pelaksana para aparat pelaksana, yang tidak mau lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanannya. Selain itu dari masing-masing dinas terkait yang tidak mau menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada UPT tersebut. Dan hambatan lain yaitu tidak adanya sanksi yang memberatkan, prosedur pengurusan yang rumit dan penuh dengan kolusi menyebabkan masyarakat enggan untuk mengurus IMB.